
Sikap Politik Pemerintah Desa Jatimukti Dalam Mendukung Pengembangan Kewirausahaan Desa

Yusa Djuyandi¹

¹ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Abstract. This research is motivated by the importance of a village government in supporting the development of entrepreneurship in the village. Jatimukti Village is a village that actually has considerable potential in developing entrepreneurship. The village government as the closest authority holder has semestically taken a political stance with the aim of advancing their village. The purpose of this study is to find out how the political attitude of the village government of Jatimukti in supporting the development of village entrepreneurship. The method used in this research is descriptive method using qualitative approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation, and field notes. The results of this study indicate that the political attitude taken by the village government of Jatimukti in developing the entrepreneurial potential of its people is still lacking. This is due to a major overhaul in the structure of the village which resulted in the implementation of the village government system and the paradigm of the village community that is difficult to change.

Keywords: Political attitude; Entrepreneurship; Jatimukti Village Government

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sebuah pemerintah desa dalam melakukan dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan yang ada di desa. Desa Jatimukti merupakan desa yang sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan kewirausahaan. Pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan paling dekat sudah semestinya mengambil sikap politik dengan tujuan untuk memajukan desanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap politik Pemerintah Desa Jatimukti dalam mendukung pengembangan kewirausahaan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap politik yang diambil Pemerintah Desa Jatimukti dalam mengembangkan potensi kewirausahaan masyarakatnya sampai saat ini masih sangat kurang. Hal ini disebabkan adanya perombakan besar-besaran dalam struktur desa yang mengakibatkan belum terlaksananya sistem pemerintah desa dan paradigma masyarakat desa yang sulit untuk diubah.

Kata kunci: Sikap politik; Kewirausahaan; Pemerintahan Desa Jatimukti

Received: 28/01/2020

Revised: 18/02/2020

Accepted: 29/02/2020

Korespondensi:

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Kab. Sumedang, 45363
Email: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan negara, tuntutan ini didasari oleh dua alasan penting, yaitu alasan konstitusional dan alasan ketahanan ekonomi negara ditengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi global. Dari sisi amanah konstitusi, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 27 ayat 2 telah mengatur bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, begitupun dalam Pasal 33 ayat 3 telah ditetapkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari kedua pasal di dalam UUD 1945 tersebut dapat ditarik adanya tuntutan yang sangat jelas tentang perlunya negara memperhatikan kehidupan masyarakatnya agar dapat hidup dengan layak dan sejahtera.

Perlunya negara menjaga ketahanan ekonomi di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi global juga menjadi alasan penting lainnya selain dari alasan konstitusi. Berdasarkan pandangan Raz, Indra, Artikasih, dan Citra (2012) bahwa fundamental ekonomi negara yang kuat dapat mempertahankan negara dari krisis ekonomi global yang menular. Selain itu dalam pandangan Boy (2009) bahwa ketika neoliberalisme masuk ke dalam sendi-sendi perekonomian global maka kemandirian ekonomi sebuah negara berada dalam sebuah pertarungan, karena itu kemandirian ekonomi menjadi isu yang sangat sentral dalam hubungan kedaulatan negara di bidang ekonomi. Kemandirian dan fundamentalisme ekonomi menjadi hal penting bagi ketahanan ekonomi sebuah negara, jika kedua hal tersebut rapuh negara akan berada pada posisi yang tidak diuntungkan di tengah-tengah arus kompetisi global. Namun demikian untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan agar negara memiliki fundamentalisme ekonomi yang kuat maka diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi (economic growth), dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari manusia yang menjadi pelaku pembangunan itu sendiri. Apabila manusianya makmur maka itulah pertanda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dianggap berhasil (Hasan & Azis, 2018).

Berdasarkan pada perspektif di atas maka upaya membangun pertumbuhan ekonomi juga perlu didukung dengan adanya upaya mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, yang diantaranya menjadikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat adalah dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, dimana salah satunya dengan membuat program kewirausahaan. Program ini dilakukan melalui penanaman jiwa kewirausahaan sejak di bangku sekolah menengah sampai dengan di bangku kuliah pada perguruan tinggi, dan juga dilakukan dengan pemberian bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Desa yang masyarakatnya dianggap memiliki mata pencaharian homogen, yaitu sebagai petani maupun nelayan, dengan latar belakang ekonomi yang relatif lebih terbelakang dibandingkan dengan kelurahan di perkotaan, menjadi wilayah yang justeru perlu terus diperhatikan perkembangannya. Saat ini upaya untuk memajukan desa dan masyarakatnya terus dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, di mana salah satu upayanya adalah dengan mendorong terwujudnya desa wirausaha (rural entrepreneurship). Tujuan menciptakan desa wirausaha diperlukan agar desa dapat maju dan berkembang. Perkembangan desa dan masyarakatnya akan menjadi salah satu upaya pendukung pembangunan ekonomi nasional yang merata dan berkelanjutan, di samping juga akan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah-tengah adanya arus globalisasi ekonomi.

Salah satu desa yang menjadi sasaran dari program desa wirausaha di Sumedang adalah Desa Jatimukti yang terletak di Kecamatan Jatinangor. Di desa ini masyarakat pada umumnya bekerja sebagai petani maupun buruh pabrik, karena berdekatan dengan Desa Jatimukti juga terdapat beberapa perusahaan industri tekstil seperti Kahatex.

Tabel 1. Status Pekerjaan Masyarakat Desa Jatimukti

Status Pekerjaan	Tidak Bekerja	Petani	Buruh Tani	Pedagang	Buruh / Karyawan	PNS, TNI, Polri
Jumlah	681	278	278	306	1.280	62

Sumber: Profil Kecamatan Jatinangor, 2018.

Namun demikian berdasarkan penjelasan dari kepala desa dan sekretaris desa, bahwa pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat tidak membuat masyarakat terjamin kesejahteraannya. Data BPS Kabupaten Sumedang (2018) juga menunjukkan bahwa jumlah keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin) dan Sejahtera I (miskin) di Desa Jatimukti masih cukup banyak, yang diantaranya berjumlah:

- 1) Pra Sejahtera : 169 keluarga
- 2) Sejahtera I : 580 keluarga
- 3) Sejahtera II – Plus: 764 keluarga

Adapun yang dimaksud dengan Pra-Sejahtera adalah mereka yang dikategorikan sangat miskin, Sejahtera I adalah miskin, dan Sejahtera II-Plus adalah keluarga yang sudah mulai mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Bappenas, 2010).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menekan angka kemiskinan di Sumedang, salah satunya di Desa Jatimukti, adalah dengan mendorong program kewirausahaan. Salah satu tantangan yang diberikan oleh Pemkab Sumedang adalah adanya minimal satu produk unggulan dari setiap desa. Tantangan ini menjadi satu hal yang juga perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Desa Jatimukti, sebab perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Jatimukti juga cenderung lambat. Hal ini terlihat dari tabel di bawah.

Tabel 2. Jumlah Usaha/Industri di Desa Jatimukti

Tahun	Klasifikasi Usaha / Industri			Jumlah
	Mikro & Kecil	Sedang	Besar	
2016	-	1	-	1
2017	10	1	-	11
2018	8	1	-	9

Sumber: Dari berbagai sumber (BPS Sumedang, 2017; BPS Sumedang, 2018; dan Laporan KKN KWU Unpad, 2019).

Berdasarkan tabel kategori usaha/industri yang dimiliki oleh sebagian masyarakat, diketahui bahwa masih banyak usaha yang termasuk kedalam skala usaha mikro dan kecil. Persoalan dari usaha mikro dan kecil adalah adanya

kemungkinan untuk “gulung tikar”, seperti turunnya jumlah usaha kategori ini di tahun 2018.

Untuk dapat mewujudkan desa wirausaha di sisi lain juga membutuhkan sikap politik yang tegas dari pemerintah desa, oleh sebab pemerintah desa memiliki otonomi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di desanya. Otonomi pemerintah desa inilah yang kemudian membedakan desa dengan satuan masyarakat hukum lainnya yang ada di perkotaan, yaitu kelurahan, disamping desa juga memiliki Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) yang keberadaannya dapat turut serta dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa. Dengan kata lain masih adanya persoalan berupa rendahnya kesejahteraan masyarakat dan tidak berkembangnya usaha mikro dan kecil di desa kemudian menimbulkan pertanyaan atas sikap politik Pemerintah Desa Jatimukti dalam mendukung pengembangan kewirausahaan desa.

Terkait dengan kebaharuan dari penelitian ini, maka peneliti telah melakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian lain yang sejenis. Dari penelusuran tersebut didapatkan adanya beberapa penelitian yang pernah mengkaji tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan UMKM atau pengembangan kewirausahaan (Santoso, Winarni, dan Haryanto, 2017; Bahri, Artha, dan Prasetyo, 2019; Septiyana, 2017). Penelitian lainnya mengkaji tentang strategi atau upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, baik dengan mendorong sektor *home industry* (Soka, 2012) maupun melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Zuhri, Antikowati, dan Soetijono, 2017).

Berdasarkan pada studi literatur yang telah dilakukan dan dipaparkan, peneliti belum menemukan adanya sebuah kajian yang pernah menganalisa tentang sikap politik Pemerintah dalam pengembangan kewirausahaan desa, khususnya di Desa Jatimukti. Atas dasar pertimbangan ilmiah di atas maka penelitian mengkaji tentang “Sikap Politik Pemerintah Desa Jatimukti dalam Mendukung Pengembangan Kewirausahaan Desa.”

Dalam menganalisa fenomena yang diteliti, peneliti setidaknya mendasarkan analisa itu dari beberapa konsep dan teori dirujuk. Penggunaan konsep dan teori ini

untuk memperkuat dasar teoritis dari riset ilmiah ini. Beberapa teori yang di rujuk adalah: sikap politik dan kewirausahaan.

a. Sikap Politik

Sikap politik pemerintah desa dalam mendukung masyarakatnya untuk dapat mengembangkan potensi kewirausahaan merupakan suatu hal yang penting, tanpa dukungan pemerintah masyarakat akan kesulitan untuk merealisasikan apa yang sudah direncanakannya. Dalam pandangan Sastroatmodjo (Sastroatmodjo, 1995) Sikap politik akan memunculkan perilaku politik, sebab itu merupakan sebuah bentuk reaksi dari objek tertentu yang bersifat politik. Termasuk halnya dalam konteks dukungan pemerintah desa dalam pengembangan kewirausahaan, jika pemerintah desa memiliki sikap politik yang tegas dalam mendukung kewirausahaan maka pemerintah desa akan memiliki perilaku politik yang memajukan potensi kewirausahaan masyarakat desa.

Istiah sikap politik merupakan gabungan dari dua kata yakni, sikap dan politik. Ada pun pengertian dari sikap dan politik yakni sikap berasal dari kata “*aptus*” yang berarti dalam keadaan sehat dan siap melakukan aksi atau tindakan, keadaan ini dianalogikan dengan keadaan seorang gladiator dalam arena laga yang siap menghadapi singa sebagai lawannya dalam pertarungan. Secara harfiah, sikap dipandang sebagai kesiapan raga yang dapat diamati (Sarwono & Merinarno, 2009).

Beberapa ahli mendefinisikan sikap secara berbeda-beda, namun demikian diantara pandangan-pandangan itu ada sebuah pandangan yang bermuara pada perilaku mendukung atau tidak mendukung sesuatu sesuai pada objek tertentu. Sikap dalam pandangan Eagly dan Chaiken sebagaimana dikutip oleh Sarwono dan Merinarno (2009) merupakan kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi entitas tertentu dengan beberapa derajat kesukaan atau ketidaksukaan. Sedangkan menurut Thurstone, Likert, dan Osgood (dalam Azwar, 2012) sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan yang mendukung atau memihak (*favorable*) ataupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada suatu objek tertentu.

Sikap yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung atau tidak mendukung suatu objek sangat berkaitan dengan aspek politik, sebab berkaitan erat dengan kepentingan warganya. Secara etimologis, politik berasal dari kata *polis* (bahasa Yunani) yang artinya negara kota makna ini kemudian berkembang dan diturunkan menjadi kata lain, yaitu *polities* yang berarti warga negara dan *politikos* yang berarti kewarganegaraan (Cholisin & Nasiwan, 2012). Dengan kata lain bahwa politik menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara

Dikarenakan politik menyangkut kepentingan dari warga negara, maka pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu menentukan tujuan dan kegiatan negara berdasarkan pada kepentingan warganya. Konteks ini sejalan dengan pemikiran Budiardjo (Budiardjo, 2008) yang menyatakan bahwa politik itu sendiri merupakan berbagai macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas bahwa sikap politik pemerintah yang mendukung kehendak rakyatnya akan membuat pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada adanya keinginan masyarakat, dan dalam konteks penelitian ini adalah pemerintah akan berupaya menentukan tujuan dan kegiatan yang mendorong pada upaya pengembangan kewirausahaan. Sikap politik pemerintah yang mendukung keinginan mayoritas warga negara bisa menjadi indikasi bahwa pemerintah telah berupaya menjalankan politik dengan baik, yaitu didasarkan pada adanya upaya mendengarkan aspirasi rakyat melalui sebuah proses interaksi yang intensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Surbakti (1992) bahwa politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Jadi sikap politik adalah suatu kemauan dan kesiapan diri dalam bertindak sebagai pola perilaku berinteraksi antara pemerintah dan masyarakat yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dan melaksanakan tujuan dengan didasarkan pada kegiatan yang mengarah pada upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan antara pemerintah dengan masyarakat.

b. Teori Kewirausahaan

Kewirausahaan atau dalam Bahasa Inggris yaitu *entrepreneurship* berasal dari kata *entreprende* dalam bahasa Prancis yang artinya petualangan, pencipta, dan pengelola usaha. Menurut pendapat beberapa ahli seperti Hisrich-Peters (dalam Alma, 2004) dijelaskan bahwa kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Selanjutnya pandangan yang cukup berbeda tentang kewirausahaan dikemukakan oleh Drucker (dalam Agustiyani, 2014), Yetisen, dkk. (2015) serta Katila, dkk. (2012), dimana ketiganya lebih menekankan pengertian bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan, mendesain, meluncuran dan menjalankan suatu bisnis yang baru dan berbeda. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi kewirausahaan yaitu kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu bisnis yang baru, bernilai dan mampu menghadapi risiko. Hal yang kemudian diharapkan dari aktivitas wirausaha ini yaitu adanya balas jasa berupa diperolehnya keuntungan dari hasil memberikan inovasi dan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pihak (Muñoz dan Otamendi, 2014).

Zimmerer (dalam Saiman, 2009) merumuskan manfaat kewirausahaan sebagai berikut :

1. Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri.
2. Memberi peluang untuk melakukan perubahan
3. Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya
4. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan
5. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya
6. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan

(Saiman, 2009)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 di Desa Jatimukti, Kecamatan Jatinangor. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Kualitatif adalah metode memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) dan wawancara, dimana wawancara dilakukan kepada sejumlah *key informant* yang terdiri dari komponen pemerintah desa, organisasi pemuda (karang taruna) dan pelaku usaha mikro di Desa Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan informan didasarkan dengan pertimbangan tertentu, seperti mengetahui soal sikap dan kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan kewirausahaan. Beberapa informan masyarakat yang kemudian di wawancara adalah Ibu Entit, Bapak Dadang, dan Ibu Uki (Mereka merupakan pelaku usaha mikro dan kecil). Pada tahap selanjutnya, untuk memperoleh data yang benar-benar valid, peneliti turut melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes, Karang Taruna dan pemerintah Desa Jatimukti.

Data-data yang kemudian diperoleh pada tahapan selanjutnya divalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi data, dimana peneliti mencari kesesuaian informasi atas satu hal yang ditanyakan kepada beberapa informan. Data yang telah di seleksi dan divalidasi kemudian masuk pada tahapan analisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Kewirausahaan

Peran kewirausahaan dalam masyarakat modern telah mengalami perubahan yang cukup drastis dalam sepuluh tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, terutama akibat kemajuan techno-sphere (lingkup teknologi) yang berimbas pada info-sphere (lingkup informasi), socio-sphere (lingkup sosial), dan psyco-sphere (lingkup psikologis). Lingkup teknologi yang dikembangkan dalam industri modern memudahkan proses

interaksi masyarakat global, memberikan akses besar dalam interaksi dunia yang melampaui sekat-sekat wilayah negara, bangsa, budaya, etnis dan ras, bahasa, dan agama. Berkat kecanggihan teknologi dunia menjadi the *global village*, terasa sempit karena garis-garis pembatas antarmasyarakat dunia seolah hilang. Dampak nyata interaksi masyarakat dunia tersebut adalah saling mempengaruhi pada aktivitas individu dan masyarakat, baik dalam ruang ekonomi dan bisnis, kebudayaan, sosial, dan politik.

Beberapa langkah penting dalam proses menuju wirausaha sukses yang harus mendapat perhatian seorang wirausahawan adalah:

1. Tentukan ceruk usaha spesifik yang relatif tidak banyak terlalu banyak pesaing.

Sebuah usaha kecil dengan sumber daya terbatas dapat melayani pangsa pasar khusus dan sempit. Tuntutan terhadap hal ini adalah menjadi yang terbaik dalam bidang itu. Misal, usaha kerudung dan jilbab yang pangsa pasarnya adalah muslimah. Artinya pangsa pasar ini hanya pada lapisan masyarakat yang spesifik. Spesifiknya terkait pada perempuan, muslimah, pemahaman keagamaan, mengerti berhijab sebagai kewajiban agama, dan komunitas hijaber. Usaha ini dapat dikaitkan dengan ranah konsultasi keagamaan seputar busana muslimah, cara pemakaian agar tampak modern, dan *smart* bagi penggunanya. Persoalan bisnis ini dapat dikaitkan dengan aktivitas spesifik seperti membuka konsultasi tentang persoalan keperempuanan dalam agama sebagai nilai tambah. Dengan ceruk pangsa pasar yang sempit dan terbatas maka memungkinkan seorang pengusaha berkonsentrasi pada bidang ini dan menghindari tabrakan dengan usaha besar yang ada. Bisnis kecil memiliki keunggulan dan keterkaitan dengan bisnis yang lebih besar dan memberi ruang untuk melakukan fleksibilitas, kemampuan merespon cepat, kemampuan memberikan pelayanan lebih personal.

2. Tentukan keunikan produk

Menentukan aspek keunikan produk menjadi penting karena berkaitan dengan ciri khas yang menjadi penanda. Penanda ini menjadi hal yang melekat pada memori manusia. Dalam teori linguistik, penanda itu penting karena memberikan ciri beda tatkala disandingkan dengan penanda pada produk lain. Penanda itu itu dapat berupa simbol dan bentuk lain yang mudah diingat oleh customer. Keunikan produk

tentu harus seiring dengan kualitas pelayanan dan manfaat produk yang diberikan. Dalam kaitan ini maka harus mengemas produk secara spesifik dan hindari praktik imitasi atau meniru produk lain, baik dalam kemasan, slogan, dan logo. Tentukan kesan pertama pada produk.

3. Membangun reputasi

Membangun reputasi dalam kewirausahaan adalah penting. Di antara langkah penting dalam hal ini adalah

- (1) Membangun kepercayaan dan menjaga keberlangsungan untuk tetap dipercaya oleh konsumen. Dalam membangun kepercayaan tersebut maka kejujuran adalah pangkal awal sebuah bisnis. Dalam setiap bisnis, baik online atau offline maka acapkali kita menjumpai berbagai komentar tentang produk dan pelayanan yang diberikan. Jangan abaikan komentar sekecil apapun yang masuk. Berikan dalam setiap komentar itu dengan respon positif, hati-hati, tepat, dan cepat. Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap komentar yang disampaikan dan memberikan pelayanan yang terbaik.
 - (2) Menepati setiap perjanjian yang dilakukan dan menepati waktu yang disepakati.
 - (3) Gunakan bahasa berkomunikasi santun.
 - (4) Menangani perselisihan atau perbedaan pendapat dengan baik.
 - (5) Menjaga hubungan relasi.
4. Memberikan kesan pertama yang positif. Dalam kaitan ini setiap orang berpotensi menjadi konsumen produk dan layanan jasa. Terkait hal itu maka seorang wirausahawan harus profesional, memiliki pengetahuan dan mengerti tentang usaha yang dilakukan, berpenampilan rapi.
 5. Peningkatan kualitas produk dan layanan.
 6. Cermati, dengarkan, dan berikan reaksi positif terhadap masukan dan inovasi.
 7. Lakukan manajemen POAC (*planning, organizing, action, controlling*) untuk sukses.
 8. Memiliki *Self confidence* (percaya diri), *Self esteem* (harga diri), dan *self love* berarti memperlakukan diri dengan kebaikan, memberikan perhatian dan dukungan, serta tetap bersikap pemaaf dan mengenali bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari pengalamannya menjadi manusia.

B. Pengembangan Wirausaha Desa melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Perguruan Tinggi dan Pemda

Penggunaan teknologi informasi yang sangat masif di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan internet, dapat berfungsi dalam membangun berbagai fasilitas kehidupan masyarakat manusia modern, memudahkan mekanisme pekerjaan, menghubungkan antarkomunitas masyarakat dunia. Penguasaan teknologi saat ini menjadi aspek penting untuk menguasai bisnis dan ekonomi. Tentu saja tidak terkecuali dalam kewirausahaan (*entrepreneur*). Pemasaran produk dan layanan melalui jaringan internet telah menjadi salah bentuk yang banyak diminati oleh para wirausahawan. Proses komunikasi bisnis kewirausahaan melalui fasilitas media sosial (medsos) seperti Facebook, Instagram, WhatsApp (WA), website telah bertumbuhan dengan beragam produk yang ditawarkan.

Media pemasaran produk pun sekarang sudah mulai berkembang, tidak hanya menggunakan cara tradisional, namun juga menggunakan media *online*. Para pelaku usaha banyak yang mempunyai toko di dunia maya (*digital*), sehingga produknya dapat dikenal secara nasional, bahkan dalam cakupan internasional. Banyak pelaku usaha yang memiliki toko *online* di berbagai aplikasi *e-commerce*. Hal tersebut mereka lakukan karena adanya “perang harga” yang terjadi di antara aplikasi-aplikasi *e-commerce* untuk menarik animo pembeli.

Penggunaan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 tidak hanya dalam memasarkan produk saja, namun sudah dalam hal pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan melakukan transfer melalui ATM, atau bahkan dapat menggunakan *e-money* atau uang elektronik. Pembayaran dapat menggunakan *aplikasi* pada *smartphone*. Atau transaksi juga dapat dilakukan dengan cara transfer via ATM, *e-banking*, dll. Dengan menggunakan *payment gateway*, para pelaku usaha tidak perlu untuk selalu melakukan pengecekan akun rekening bank, namun dapat dipantau dengan aplikasi, atau mendapatkan notifikasi jika terjadi suatu transaksi.

Saat ini, seorang *entrepreneur* telah memainkan peran paling penting dalam ekonomi modern. Kewirausahaan telah dianggap sebagai mesin pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Kewirausahaan adalah fenomena ekonomi yang patut mendapat perhatian karena pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat melaju

pada tingkat yang cukup diperhitungkan. Hal tersebut dapat terjadi karena seorang *entrepreneur* tidak hanya mampu untuk menimbulkan dampak positif bagi dirinya sendiri, namun bahkan dapat memajukan daerahnya, khususnya orang-orang yang berada dalam lingkungan ekosistem bidang usahanya.

Online market mempunyai pangsa pasar yang sangat besar. Menurut data dari Bank Indonesia, pada tahun 2018, transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai 77,766 Triliun rupiah. Dan tahun ini diprediksi semakin meningkat, pada bulan Januari 2019, transaksi *online* mencapai Rp 8,204 triliun, meningkat 135,8% dibandingkan dengan transaksi yang terjadi pada Januari 2018. Pola hidup masyarakat pada jaman sekarang berpengaruh besar terhadap melonjaknya transaksi di dunia digital tersebut. Alasan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja menjadi salah satu poin yang dibidik oleh para pelaku usaha di dunia digital ini. Tanpa keluar rumah dan terjebak dalam kemacetan, hanya dengan menggunakan aplikasi dari *smartphone*, konsumen bisa mendapatkan barang yang diinginkannya hanya dengan memilih barang, melakukan transaksi *online*, kemudian barang tersebut akan dikirimkan ke alamat tujuan.

C. Potensi Kewirausahaan di Desa Jatimukti

Desa Jatimukti merupakan desa yang berada di Kecamatan Jatinangor, sebuah desa yang dahulunya adalah wilayah pemekaran dari Desa Jatiroke. Potensi kewirausahaan di desa ini ialah di bidang produksi olahan makanan rumahan (*home industry*) yang dibuat oleh beberapa warganya seperti keripik singkong Ibu Entit yang sudah dikenal luas di Desa Jatimukti, bahkan di desa sekitarnya. Selain itu juga karena wilayah Desa Jatimukti berada di dekat pabrik kahatex, sehingga membuat masyarakat membuka toko atau warung untuk menjual makanan di sekitar pabrik dan sepanjang jalan menuju pabrik tersebut.

Selain itu, potensi kewirausahaan di Desa Jatimukti dibantu dengan setiap RW terdapat minimal satu usaha yang unggul. Terdapat 7 RW yang masing-masing RW warganya mempunyai usaha di bidang makanan, seperti RW 1 terdapat usaha opak, RW 2 usaha keripik pisang, RW 3 keripik singkong, RW 4 bolen pisang, RW 5 telur asin, serta RW 6 dan RW 7 adalah lakar.

Hal ini diupayakan sebagai bentuk kekonsistenan pemerintah desa dalam pemfokusan bidang usaha yang dijalani oleh warganya. Pemerintah desa sebagai

penentu kebijakan dalam berbagai hal tentunya menjadi tolak ukur dalam hal penyebaran potensi kewirausahaan warganya.

D. Sikap Politik Pemerintah Desa

Pada saat ini pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian desa dan masyarakatnya, terlebih lagi sedang digalakkannya program *One Village One Product* dimana program ini dapat mendukung aktivitas *e-commerce* yang dapat memajukan perekonomian masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan sebuah desa dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi masyarakatnya (Tarigan, 2003). Sebuah desa dikatakan sudah maju apabila perekonomian masyarakatnya sudah semakin meningkat serta ditandai dengan tidak adanya kesenjangan sosial dan ekonomi (Sukidjo, 1995).

Untuk mewujudkan desa maju dan berkembang dibutuhkan kerja sama dan kerja keras dari berbagai pihak, seperti masyarakat dan pemerintah desa. Sikap politik pemerintah desa perlu dilakukan yaitu dengan menggunakan kekuasaannya untuk ikut berperan dalam perkembangan kewirausahaan yang berada di desa, sehingga pemerintah desa dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dengan berwirausaha.

Desa Jatimukti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatinangor. Desa ini berdiri pada tahun 1982 yang merupakan desa pemekaran dari Desa Jatiroke. Mayoritas mata pencaharian masyarakatnya menjadi buruh di sebuah pabrik tekstil. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Kepala Desa Jatimukti yaitu Bapak Roni beliau mengatakan bahwa Desa Jatimukti baru saja melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur desanya akibatnya belum terlaksanannya sistem pemerintah desa yang seharusnya berjalan sebagaimana mestinya dan juga mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai buruh ini menjadi salah satu kendala dalam mendorong jiwa kewirausahaan masyarakatnya karena budaya yang tertanam kuat di dalam masyarakat sulit untuk diubah. Maka, selama desa ini berdiri belum terdapat produk yang dapat diunggulkan.

Kewirausahaan merupakan salah satu faktor pendukung perekonomian masyarakat dimana dengan adanya kewirausahaan ini dapat mengurangi masalah perekonomian di masyarakat. Adapun bentuk usaha di dalam masyarakat yaitu

UMKM. Namun untuk mengembangkan UMKM di suatu desa diperlukan faktor-faktor pendukung dari berbagai pihak seperti peranan pemerintah. Menurut Diva (2009) menjelaskan bahwa peranan pemerintah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal dapat diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.

Sebagai fasilitator pemerintah desa memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai pengembangan UMKM dan memfasilitasi pengembangan tersebut. Peran pemerintah tersebut diantaranya yaitu dengan mendorong tumbuhnya para *entrepreneur* melalui kebijakan mikro dan budaya. Kebijakan mikro yaitu melalui pemberian bantuan kepada usaha perseorangan. Misalnya jika ada pengusaha yang kekurangan modal maka pemerintah bisa membantu dengan memberi kredit yang telah disubsidi. Diharapkan dengan subsidi tersebut pengusaha kecil akan mempunyai margin yang cukup besar untuk pengembangan usaha lebih lanjut. Sedangkan peran pemerintah mendorong *entrepreneur* melalui budaya yaitu dengan cara mengembangkan budaya usaha melalui perubahan orientasi budaya yang berkembang di masyarakat.

Desa Jatimukti memiliki beberapa wirausaha mikro yang hampir ada di setiap RW. Namun kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatimukti masih perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut lagi agar bisa berkembang lebih pesat dan dikenal oleh banyak orang. Sehingga dengan adanya para pelaku wirausaha yang ada di Desa Jatimukti ini dapat menciptakan produk unggulan yang mana nantinya bisa menjadi *icon* bagi Desa Jatimukti. Untuk pengembangan kewirausahaan di Desa Jatimukti sudah pasti masyarakat sebagai pelaksana usaha tersebut memerlukan modal. Jika dilihat dari peran pemerintah melalui kebijakan mikro, pemerintah Desa Jatimukti masih belum terlaksana. Dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang wirausaha di Desa Jatimukti beliau mengatakan bahwa beliau pernah mengajukan kepada pemerintah desa untuk meminta bantuan berupa mesin untuk mengembangkan usahanya, namun hal tersebut ditolak oleh pemerintah desa setempat hanya karena usaha yang dilakukan beliau hanya usaha perseorangan bukan usaha kelompok.

Sedangkan dilihat dari kebijakan pengembangan budaya usaha di Desa Jatimukti juga masih belum baik. Pemerintah Desa Jatimukti masih belum bisa

mengubah pandangan masyarakat. Mayoritas para wirausaha yang ada, berwirausaha dengan pemasaran produk yang masih konvensional. Pemasaran yang mereka lakukan yaitu dengan cara menitipkannya ke warung-warung kecil dan menjualnya langsung dengan cara berkeliling desa. Sehingga pengenalan produk para wirausaha di Desa Jatimukti masih dalam lingkup kecil. Padahal di zaman milenial seperti sekarang sangatlah mudah untuk memasarkan produk secara cepat dengan memanfaatkan teknologi misalnya melalui sosial media, seperti *instagram*, *shopee*, *facebook*, dan lainnya. Sehingga hal ini memerlukan peranan pemerintah desa dalam perubahan budaya usaha yang ada di Desa Jatimukti yaitu dengan perubahan budaya usaha pemasaran produk konvensional menjadi pemasaran produk dengan pemanfaatan teknologi. Bentuk peranan pemerintah tersebut dapat berupa pengadaan sosialisasi mengenai pemanfaatan sosial media dalam pemasaran produk termasuk bagaimana penggunaan aplikasi sosial media tersebut untuk berwirausaha.

Peran pemerintah sebagai katalisator dalam pengembangan UMKM yaitu dengan mempercepat proses berkembangnya UMKM dimana terkadang pemerintah desa ikut terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator pemerintah dapat melakukan berbagai langkah, seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM, dan permodalan. Langkah-langkah tersebut dapat diaplikasikan oleh pemerintah Desa Jatimukti agar pengembangan UMKM yang ada berlangsung lebih cepat, misalnya menentukan salah satu hasil produksi UMKM sebagai produk unggulan, mengadakan pagelaran untuk mengenalkan atau mempromosikan hasil produksi UMKM Desa Jatimukti, dan pemerintah Desa Jatimukti dapat memberikan bantuan dalam bentuk bantuan modal kepada para pelaksana UMKM. Sehingga diharapkan UMKM Desa Jatimukti makin maju dan berkembang pesat serta dikenal oleh khalayak ramai.

KESIMPULAN

Otonomi daerah memberikan kesempatan atau peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Tidak terkecuali bagi pemerintah desa, di mana seiring dengan adanya upaya untuk terus memajukan desa maka pemerintah

desa bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya.

Salah satu upaya untuk memajukan desa di Kabupaten Sumedang adalah dengan mendorong adanya program pengembangan kewirausahaan desa. Sebagai bagian dari struktur dan sistem pemerintahan terendah di daerah, sikap politik pemerintah desa dalam mendukung pengembangan kewirausahaan desa menjadi sangat penting. Akan tetapi di tengah-tengah dirasakan pentingnya dukungan dari pemerintah desa, justru sikap politik Pemerintah Desa Jatimukti dalam mengembangkan potensi kewirausahaan masyarakatnya sampai saat ini masih kurang. Perombakan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap struktur desa, terutama atas lembaga BUMDes dan koperasi desa belum membantu masyarakat untuk mendapatkan kemudahan bantuan peralatan serta modal usaha. Di sisi lain upaya-upaya yang mengarah pada penyuluhan dan sosialisasi untuk pengembangan kewirausahaan juga masih rendah dan bergantung pada bantuan dari luar desa.

Di saat kondisi tidak maksimalnya bantuan dan dukungan Pemerintah Desa Jatimukti dalam mendukung pengembangan kewirausahaan desa, kemudian Pemerintah Kabupaten Sumedang kemudian turut melibatkan para *stakeholder* lain, seperti halnya dengan melibatkan Universitas Padjadjaran dalam mensukseskan pengembangan kewirausahaan.

REKOMENDASI

Program pengembangan kewirausahaan merupakan hasil dari sebuah kebijakan politik yang bertujuan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, di mana seyogyanya kebijakan ini juga mendapat dukungan yang maksimal dari satuan-satuan pemerintahan. Di saat sikap politik Pemerintah Desa Jatimukti masih dirasakan kurang dalam mendukung pengembangan kewirausahaan, maka ada saran yang kemudian peneliti usulkan agar sikap politik pemerintah desa menjadi jelas dan tegas, yaitu:

- 1) Kepala desa untuk jangka panjang harus terus berusaha mengembangkan potensi kewirausahaan yang ada di Desa Jatimukti.
- 2) Pemerintah Desa beserta perangkat desa dan organisasi desa lainnya perlu menggali potensi kewirausahaan desa dengan baik.

- 3) Sikap politik dalam mengembangkan kewirausahaan desa perlu mempertimbangkan aspek: keadilan, keamanan, dan kesinambungan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini tidak dapat berjalan tanpa adanya bantuan atau sumbangan dana penelitian dari adanya lembaga atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini, karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada Universitas Padjadjaran atas bantuan dana penelitian yang telah diberikan, Pemerintah Desa Jatimukti dan ketua lembaga BUMDes, Karang Taruna dan PKK Desa Jatimukti, Sumedang, atas kerjasama dan kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk kegiatan penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan amal pahala yang berlipat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiyani. (2014). Pengaruh Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berwirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Angkatan Tahun 2011 UIN Walisongo Semarang). *Thesis S1*, UIN Walisongo.
- Alma, B. (2004). *Kewirausahaan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Azwar, S. (2012). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang. (2018). *Kecamatan Jatinangor dalam Angka Tahun 2018*. Sumedang: BPS Kabupaten Sumedang.
- Bahri, Artha, B., & Prasetyo, W. (2019). Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Kewirausahaan Pertanian Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 6(2), hal. 82-94. <https://doi.org/10.33059/jpas.v6i2.1313>.
- Bappenas. (2010). *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I)*. Jakarta: Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bappenas.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin, & Nasiwan. (2012). *Dasar-Dasar Politik Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.

- Diva, G. (2009). *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal)*. Makassar: CV Nur Lina.
- Hendro. (2011). *Dasar-dasar Kewirausahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Katila, R., Chen, E. L.; Piezunka, H. (2012). "All the right moves: How entrepreneurial firms compete effectively." *Strategic Entrepreneurship JNL*, 6(2), hal. 116–132.
- Muñoz, F., Otamendi, F. J. (2014) "Entrepreneurial effort and economic growth." *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 4(8). <https://doi.org/10.1186/2251-7316-2-8>.
- Raz, A. F., Indra, T. P., Artikasih, D. K., & Citra, S. (2012). Krisis Keuangan Global dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisa dari Perekonomian Asia Timur. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 15 (2), hal. 1-20.
- Saiman, L. (2009). *Kewirausahaan Teori, Praktek dan Kasus-kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, T. T., Winarni, L., & Haryanto, A. T. (2017). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Gabugan. *Jurnal Transformasi*, 1 (32), hal. 1-75.
- Sarwono, S. W., & Merinarno, E. A. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Septiyana, M. (2017). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha Kecil Tasbih dan Aksesoris (Studi Kasus di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Soka, B. R. (2012). Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Sektor Home Industry. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), hal. 27-39.
- Sugiyono. (2008). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukidjo. (1995). Upaya Pengembangan Ekonomi Pedesaan. *Cakrawala Pendidikan*, 14(2), hal. 57-68.

- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Tarigan, A. (2003). "Rural-Urban Economic Linkages" Konsep dan Urgensinya dalam Memperkuat Pembangunan Desa. *Pembangunan Wilayah: Perencanaan Pembangunan*, No. 31, hal. 24-30.
- Yetisen, A. K., Volpatti, L. R., Coskun, A. F., Cho, S., Kamrani, E., Butt, H., Khademhosseini, A., Yun, S. H. (2015). "Entrepreneurship". *Lab Chip*, 15(18), hal. 3638 – 3660. [doi:10.1039/c5lc00577a](https://doi.org/10.1039/c5lc00577a)
- Zuhri, M. I., Antikowati, & Soetijono, I. R. (2017). *Upaya Pemerintah Desa dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jember: Universitas Jember